
Upaya Peningkatan Kapasitas Soft Power Tiongkok melalui Diplomasi Olahraga dalam Olimpiade Beijing 2008

Immanuela Yahya¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini melihat bagaimana upaya Tiongkok meningkatkan kapasitas soft power yang dimilikinya melalui diplomasi olahraga yang ditampilkan pada Olimpiade Beijing 2008. Menggunakan model kuasi kualitatif, penelitian ini menunjukkan bagaimana olahraga sendiri merupakan suatu ajang melakukan diplomasi dan dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas soft power Tiongkok. Menggunakan Grix (2019) sebagai kategori soft power yang dimiliki, penelitian ini berfokus pada aspek budaya, citra, dan diplomasi. Serangkaian diplomasi dilakukan untuk mengubah persepsi dunia mengenai Tiongkok menjadi sebuah negara yang kuat, modern, dan mampu bersinergi dengan norma-norma hubungan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui diplomasi olahraga, Tiongkok berhasil memperbaiki citra dirinya dalam hal budaya olahraga, citra sebagai negara yang maju dan bersahabat, serta kemampuan diplomasi yang baik. Secara umum Tiongkok berhasil mengubah persepsi masyarakat internasional mengenai citra negaranya sehingga lebih baik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pasca Olimpiade Beijing 2008, Tiongkok menunjukkan dirinya dalam berbagai kesempatan sebagai pemain penting di dunia internasional dan pengaruhnya yang mulai dirasakan dalam isu-isu strategis dalam cakupan internasional.

Kata-kunci : diplomasi, olahraga, olimpiade, *soft power*, Tiongkok

Abstract

This research examines how China sought to enhance its soft power capabilities through sports diplomacy showcased during the 2008 Beijing Olympics. Using a quasi-qualitative model, this study demonstrates how sports themselves serve as a platform for diplomacy and, in this case, were intended to bolster China's soft power capacity. A series of diplomatic efforts were undertaken to alter the world's perception of China as a strong, modern nation capable of aligning with international norms. Using Grix (2019) as a category of soft power, this research focuses on aspects of Culture, Branding and Diplomacy. A series of diplomacy was carried out to change the world's perception of China into a country that is strong, modern, and able to synergize with international relations norms. The research results show that through sports diplomacy, China has succeeded in improving its image in terms of sports culture, its image as a developed and friendly country, and its good diplomatic skills. Overall, China considered succeed in changing foreign audience about its branding to a better light. The research results also reveal that post the 2008 Beijing Olympics, China positioned itself on numerous

occasions as a key player in the international arena, and its influence began to be felt in strategic issues on the global stage.

Keywords : *China, diplomacy, Olympic, sport, soft-power*

Kontak Penulis

Immanuela Yahya

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Bali, 80234

Telp: (0361) 704845

E-mail : taharella@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dalam dinamika politik internasional menempatkan *soft power* sebagai komponen penting dalam meningkatkan pengaruh suatu negara. Sejalan dengan hal tersebut, maka menjadi penting bagi suatu negara untuk meningkatkan citra serta kapasitas *soft power* yang dimilikinya, tidak terkecuali bagi Tiongkok yang ingin menjelma menjadi suatu kekuatan baru dunia.

Kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas *soft power* sejalan dengan visi Tiongkok, yaitu *Peaceful Rise*. *Peaceful Rise* adalah suatu strategi yang dijalankan oleh Tiongkok dalam proses mewujudkan mimpinya menjadi kekuatan dunia yang baru. Dalam strategi ini, Tiongkok menginginkan cara-cara damai dan kerjasama yang baik dengan berbagai negara (Bijian, 2005). Sayangnya, sejarah mencatat Tiongkok sebagai negara dengan masa lalu kelam, penuh dengan agresivitas, dan setumpuk pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karenanya, Tiongkok memerlukan kerja yang sangat keras untuk memperbaiki citranya di mata dunia internasional.

Kebutuhan Tiongkok untuk menunjukkan peningkatan kapasitas dan pengaruh yang dimilikinya di dunia internasional dengan cara-cara damai membuat Tiongkok perlu menjalankan diplomasi publik. Dalam hal ini, Tiongkok memilih untuk menggunakan olahraga sebagai salah satu cara menjalankan diplomasi publik atau dikenal dengan diplomasi olahraga. Secara spesifik yaitu dalam bentuk sebagai tuan rumah penyelenggara Olimpiade 2008.

Menggunakan olahraga sebagai sebuah alat kepentingan politik internasional atau dikenal dengan diplomasi olahraga (*sport diplomacy*) bukanlah hal baru. Menurut Allison dan Monnington, kompetisi olahraga internasional seringkali digunakan sebagai alat kepentingan

politik yang tujuannya bisa dikategorikan sebagai dua hal, yaitu sebagai alat pengakuan internasional, maupun alat hukuman bagi negara lain yang dianggap tidak menjalankan norma internasional (2005).

Tiongkok juga bukanlah negara pertama yang menggunakan Olimpiade sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas *soft power* yang dimilikinya. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Korea Selatan dan Korea Utara. tulisan dari A.A. Gede Oka Lokanata Putra S, Sukma Sushanti, serta Putu Ratih Kumala Dewi yang berjudul *Kepentingan Pertahanan Korea Selatan melalui Joint Team Korea Dalam Winter Olympic 2018*. Putra et al., (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan Winter Olympic 2018 yang merupakan *joint effort* antara Korea Utara dan Korea Selatan merupakan momentum bagi Korea Selatan untuk membangun hubungan diplomasi dengan Korea Utara. Hubungan diplomasi ini dibutuhkan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya berupa keamanan di Semenanjung Korea dari ancaman nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara. Meskipun tidak mendapatkan medali apapun dalam Winter Olympic 2018, olahraga telah menjadi instrumen diplomasi yang penting bagi kedua negara, dengan titik berat pembahasan khususnya bagi Korea Selatan.

Strategi menggunakan acara olahraga sebagai sebuah instrumen meningkatkan kapasitas *soft power* juga merupakan strategi yang umum dilakukan, khususnya bagi negara berkembang. Jonathan Grix dan Donna Lee dalam tulisannya yang berjudul *Soft Power, Sports Mega-Events and Emerging States: The Lure of the Politics of Attraction* menyatakan bahwa meskipun dahulu badan regulasi olahraga internasional sempat mengalami masa dimana mereka kesulitan untuk menemukan negara yang mau menjadi tuan rumah ajang kompetisi olahraga internasional seperti Piala Dunia, Olimpiade, dan Paralimpiade, kini banyak negara

berlomba-lomba menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara tersebut, khususnya dari negara berkembang. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan kompetisi olahraga internasional dianggap sebagai suatu bentuk diplomasi publik yang berfungsi untuk menunjukkan kapabilitas *soft power* suatu negara serta meningkatkannya dan kategori negara berkembang tentu saja lebih membutuhkan hal tersebut.

Di Asia sendiri, setidaknya terdapat 3 negara yang pernah menjadi tuan rumah pesta olahraga internasional atau dikenal dengan *sport mega event* (SME), yaitu Tiongkok dengan Olimpiade Beijing 2008, Korea Selatan dengan Piala Dunia 2012, serta Jepang dengan Olimpiade 2020. Jeong dalam tulisannya yang berjudul *How Nations Use Sport Mega-Events to Leverage Soft Power: A New Rise in East Asia* berupaya melakukan komparasi diantara ketiganya. menunjukkan bahwa melalui SME, ketiga negara tersebut berhasil meningkatkan *soft power* yang dimilikinya. Selain itu, penelitian tersebut juga berhasil menunjukkan bahwa terdapat apa yang disebut dengan gaya Asia Timur dalam menyelenggarakan SME.

Tulisan ini sendiri akan berfokus pada melihat upaya-upaya yang dilakukan Tiongkok untuk meningkatkan *soft power* yang dimilikinya melalui diplomasi olahraga pada Olimpiade Beijing 2008.

METODE

Penelitian ini mengambil model kuasi-kualitatif karena menitikberatkan pada teori atau penelitian terdahulu sebagai dasar dalam membangun argumentasi dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisis fenomena sosial berupa upaya-upaya yang dilakukan suatu negara, dalam hal ini Tiongkok, untuk meningkatkan *soft power* yang dimilikinya melalui diplomasi olahraga. Diplomasi olahraga yang dimaksud adalah pada saat

penyelenggaraan Olimpiade Beijing 2008. Penulis akan menggunakan pisau analisis berupa teori *soft power* yang diperkenalkan oleh Joseph Nye serta diplomasi olahraga untuk mengupas upaya yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut. Diplomasi olahraga akan dipakai untuk menjelaskan bagaimana Olimpiade Beijing 2008 digunakan oleh Tiongkok, sementara teori *soft power* akan digunakan untuk menganalisa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada sumber data sekunder, yaitu jurnal, buku, berita dan tulisan akademik yang berhubungan dan relevan dengan topik terkait *soft power* serta diplomasi olahraga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjadi tuan rumah Olimpiade memiliki dampak dan nilai strategis. Dampak dan nilai strategis ini yang tidak hanya dalam aspek ekonomi, tapi juga aspek-aspek lain yang bertujuan meningkatkan citra sebuah negara dalam pandangan internasional. Hal ini sejalan dengan Temuan Rose dan Spiegel (2011), yang menyatakan bahwa dampak Olimpiade terhadap keterbukaan suatu negara sangatlah kuat dan bertahan lama. Aspek keterbukaan ini, bisa jadi sama besar atau bahkan lebih berharga daripada aspek ekonomi

Nilai strategis lainnya dalam penyelenggaraan Olimpiade bagi sebuah negara dapat dilihat dalam aspek ekonomi. Parameter yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai strategis tersebut adalah pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata.

Di samping itu, Diplomasi olahraga sebagai bagian dari diplomasi publik memungkinkan adanya penggiringan persepsi publik internasional sehingga memunculkan wajah baru yang sangat mungkin berbeda dengan persepsi yang sudah ada selama ini. Visibilitas

dan familiaritas tersebut kemudian dapat digunakan untuk mempengaruhi citra negara tuan rumah secara positif. Kobierecki dan Strozek (2020) menunjukkannya lewat hasil penelitian mereka dimana menjadi tuan rumah Olimpiade meningkatkan visibilitas dan familiaritas negara lain terhadap negara tuan rumah.

Sebelum tampil sebagai tuan rumah Olimpiade, Tiongkok terlebih dahulu membuktikan kapabilitas dirinya dalam menjadi tuan rumah pergelaran acara olahraga multinasional level regional. Tiongkok memulai pertunjukan kapabilitasnya diawali dengan melakukan tender untuk menjadi tuan rumah Asian Games XI tahun 1990 di tahun 1983. Selisih waktu 7 tahun antara proses tender dengan penyelenggaraan Asian Games itu sendiri termasuk sangat singkat, mengingat sampai dengan 10 tahun yang lalu, di tahun 1973, Tiongkok menutup diri dari hampir segala bentuk federasi olahraga internasional.

Setidaknya terdapat tiga poin yang perlu diperhatikan atas keberhasilan Tiongkok menjadi tuan rumah Asian Games. Pertama, majunya Tiongkok dalam tender Asian Games menunjukkan kepercayaan diri Tiongkok untuk dapat memberikan fasilitas kelas dunia dalam menjadi tuan rumah acara olahraga internasional. Terlebih karena Tiongkok berhasil menang atas Jepang dalam memperebutkan titel sebagai tuan rumah Asian Games XI, sebuah negara yang pada saat itu dianggap lebih maju daripada Tiongkok. Kedua, dengan mengawali di level regional, Tiongkok juga menunjukkan prinsip kehati-hatiannya dalam mengelola perekonomian negara. Ketiga, bahwa Tiongkok memainkan unsur diplomasi olahraga dalam jangka panjang. Mengawali di level regional membuatnya menjadi familiar bagi negara-negara lain setidaknya di kawasan regional dan membangun dukungan di kawasan regional.

Kesuksesan tender dalam tuan rumah Asian Games XI diikuti dengan terpilihnya Tiongkok menjadi penyelenggara pada acara East Asian Games untuk pertama kalinya di tahun 1993. Kedua pesta olahraga tingkat internasional tersebut meningkatkan kepercayaan diri Tiongkok, serta membuka mata dunia akan kapabilitas Tiongkok dalam menjadi tuan rumah. Hal ini menjadi modal besar bagi Tiongkok untuk mewujudkan ambisi dan mimpi yang berumur hampir 1 abad lamanya, yaitu menjadi tuan rumah Olimpiade.

Perjalanan Tiongkok mendapatkan kepercayaan menjadi tuan rumah Olimpiade adalah jalan yang panjang. Di dalamnya, mengandung unsur dinamika politik, tarik menarik kepentingan, serta negosiasi. Terlebih karena Tiongkok sendiri pernah keluar dari Komite Olimpiade Internasional atau International Olympic Committee (IOC) disebabkan adanya isu Dua Cina. Detail perjalanan Tiongkok dalam keikutsertaannya di IOC dapat dilihat pada Tabel 1. Dibutuhkan waktu kurang lebih 15 tahun sejak kali pertama mengajukan diri sebagai tuan rumah sampai dengan akhirnya Olimpiade tersebut dapat berlangsung di Tiongkok. Semua itu membutuhkan keterlibatan berbagai unsur dalam negara sehingga akhirnya Tiongkok dianggap layak dan berhasil menyuguhkan tontanan, tempat, dan atmosfer kelas dunia.

Proses tender menjadi tuan rumah Olimpiade sendiri juga dipenuhi dengan dinamika politik. Dinamika tersebut menarik untuk dicermati. Misalnya saja, Tiongkok menolak berpartisipasi dalam tender tuan rumah Olimpiade 2004 sekalipun menjadi negara favorit untuk

Tabel 1: Perjalanan Tiongkok dalam IOC

Tahun	Peristiwa
1932	Tiongkok berpartisipasi dalam Olimpiade dengan nama Republik Tiongkok
1952	<ol style="list-style-type: none"> Berpartisipasi dalam Olimpiade sebagai Republik Rakyat Tiongkok Sebagai dampak dari Perang Sipil beberapa pendukung Kuomintang melarikan diri ke Taiwan dan membentuk Komite Olimpiade tersendiri. Keduanya menyurati IOC agar bisa berkompetisi pada Olimpiade 1952. IOC mengizinkan Taiwan mengikuti Olimpiade dengan nama Republik Tiongkok (<i>Republic of China</i>). Taiwan tidak jadi mengikuti kompetisi Olimpiade 1952 karena mengetahui IOC juga memberikan izin bagi RRT dalam Olimpiade tersebut. Isu mengenai dua Cina dimulai.
1954	RRT keluar dari IOC, PBB dan seluruh federasi olahraga internasional karena merasa kedaulatannya tidak dihargai dengan baik oleh IOC dengan mengizinkan Taiwan menggunakan kata Tiongkok (China) dan mengikutsertakannya dalam keanggotaan IOC
1958	Keluarnya RRT dari berbagai federasi olahraga internasional menjadikan delegasi pengamat RRT ditolak menghadiri Asian Games meskipun bukan pertama kalinya Tiongkok mengirimkan delegasi pengamat ke Asian Games.
1971	Adanya diplomasi Ping Pong membuat ketegangan antara Barat dengan Tiongkok mulai mencair dan membuka ruang diskusi diantara keduanya.

memenangkan tender tersebut. Tiongkok memilih untuk tidak mengajukan diri, dan membiarkan negara-negara di Afrika berkompetisi untuk memenangkan hal tersebut. Pemilihan strategi ini memberikan sinyal bahwa Tiongkok adalah negara yang bersahabat. Negara yang rela menunda realisasi mimpi yang 100 tahun lamanya, supaya negara lain, terutama benua Afrika yang dipandang sebelah mata memiliki momentum untuk menunjukkan kapabilitas dirinya. Terlebih karena Tiongkok dan negara-negara di Afrika memiliki hubungan yang erat.

Hubungan baik ini berbuah manis pada saat Tiongkok melakukan tender untuk Olimpiade 2008. Hal ini ditunjukkan dengan bahwa seluruh member IOC yang berasal dari negara di Afrika memberikan suaranya untuk Tiongkok pada pemungutan suara atas tender di tanggal 13 Juli 2001. Hal ini berarti memastikan Tiongkok setidaknya mengantongi 15 suara atau sekitar 12% dari total suara yang diperebutkan. Kondisi dimana di fase terakhir tersisa 5 negara sebagai obyek untuk dilakukan pemungutan suara, mengantongi 12% suara sendiri

merupakan hampir suatu keniscayaan atas kemenangan.

Di dalam negeri sendiri, antusiasme masyarakat untuk mengawal agar Tiongkok berhasil menjadi tuan rumah merupakan salah satu faktor pendukung yang mencuri hati Komite IOC sehingga dapat menghasilkan laporan kunjungan yang menguntungkan bagi Tiongkok. Keterlibatan publik misalnya ditunjukkan di wilayah Guangzhou, dimana lebih dari 400 warga lanjut usia dengan usia rata-rata di atas 85 tahun bergabung dalam kampanye tanda tangan untuk tender Olimpiade Beijing. Selain itu, Orang Tionghoa dari semua kelompok etnis dan semua lapisan masyarakat, berkumpul di Pulau Hainan menjalankan pertunjukan untuk menunjukkan harapan mereka yang kuat untuk merayakan Olimpiade di Tiongkok. Keterlibatan masyarakat atau aktor non pemerintah ini merupakan ciri khas dari diplomasi publik. Sebagaimana disebutkan dalam Nye (2008), satu dari tiga sumber utama *soft power* suatu negara terletak pada budayanya.

Dukungan publik merupakan bagian tidak terpisahkan dari diplomasi olahraga yang mana merupakan bagian dari diplomasi publik. Tiongkok mendapatkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, bahkan anggota IOC berkewarganegaraan Tiongkok. Sebanyak 94,9% masyarakat Tiongkok mendukung Tiongkok sebagai tuan rumah Olimpiade. Sementara itu, hanya 60% warga negara Perancis dan Kanada mendukung negaranya dalam tender ini. Dalam diplomasi publik dimana keterlibatan publik adalah salah satu yang menjadi faktor penting, hal ini merupakan modal besar bagi Tiongkok.

Meskipun demikian, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah karakteristik Tiongkok sendiri yang merupakan negara sosialis dengan kontrol yang kuat memungkinkan hal ini terjadi. Kontrol yang kuat ini merupakan karakteristik negara sosialis yang memungkinkan pemerintah mengatur segala aspek kehidupan (Boer, 2021). Kontrol inilah yang tidak dimiliki negara-negara dengan corak demokratis.

Selain melakukan kontrol atas aspek dukungan publik di dalam negeri, BOBICO juga berupaya mempertahankan hubungan dekat dengan media internasional dengan menghadiri wawancara mereka atau mengundang mereka untuk mengunjungi Beijing. Tiongkok melalui BOBICO juga bekerja sama dengan media besar dalam memproduksi film dokumenter bertema Olimpiade. Pemerintah Tiongkok kemudian melakukan lobi sehingga film dokumenter ini sebisa mungkin ditayangkan di setiap konferensi internasional yang dihadiri Tiongkok. Sekitar 100 kantor berita global, radio dan TV mewawancarai staf senior BOBICO.

Kontrol atas atmosfer publik inilah yang menjadikan Tiongkok mendapat nilai sangat besar pada fase kedua. Tiongkok berada pada citra terbaiknya pada saat fase final pemilihan tuan rumah Olimpiade 2008. Semua aspek di

atas akhirnya membawa Tiongkok memenangkan tender atas tuan rumah Olimpiade.

Pasca terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade 2008, Tiongkok perlu menunjukkan komitmennya untuk membuktikan seluruh janji pada saat tender. Olimpiade 2008 dimenangkan oleh Tiongkok dengan mengusung tema *Green Olympics, High-tech Olympics and People's Olympics*. Untuk mewujudkannya, Tiongkok perlu melakukan berbagai pembangunan fisik sehingga memenuhi komitmen tersebut.

Pembangunan ini dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan untuk komitmen Tiongkok terhadap isu lingkungan yang menjadi sorotan karena tingginya pembangunan. Konsep *Green Olympics, High-tech Olympics and People's Olympics* adalah komitmen Tiongkok kepada dunia ketika melakukan tender. Dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Olimpiade, Tiongkok telah melakukan segala upaya untuk mewujudkan janjinya tersebut, misalnya saja dengan mengimplementasikan panel yang hemat energi dalam mendukung pencahayaan stadion utama, sistem pengumpulan air hujan yang terintegrasi, dan teknologi yang membuat lapangan pertandingan lebih efisien bagi atlet.

Banyak perubahan yang terjadi bagi Tiongkok pasca kesuksesannya menyelenggarakan Olimpiade 2008. Grix et al (2019) merumuskan bahwa terdapat 5 kategori soft power package suatu negara, yaitu aspek *Culture, Tourism, Branding, Diplomacy*, serta *Trade*.

Penelitian ini tidak memasukkan kategori Pariwisata (*Tourism*) dan Perdagangan (*Trade*). Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi hal ini. Faktor pertama adalah tidak terdapat tulisan resmi yang berupa konfirmasi dari pemerintah Tiongkok dalam menggunakan Pariwisata dan Perdagangan

sebagai salah satu kategori *soft power* yang dimiliki oleh Tiongkok.

Faktor kedua juga disebabkan sedikit sekali kajian literatur yang bisa digunakan untuk mengonfirmasikan bentuk konkret Pariwisata dan Perdagangan sebagai salah satu *soft power* yang dimiliki oleh Tiongkok. Satu-satunya kajian yang bisa digunakan adalah tulisan Jeong (2021) yang menyatakan Tembok Besar Cina dan beberapa situs UNESCO sebagai bentuk *soft power* Tiongkok. Namun demikian, menurut pendapat penulis, terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan hal tersebut sebagai bentuk *soft power* Tiongkok.

Kelemahan pertama adalah tidak relevannya kedua hal tersebut dengan diplomasi olahraga. Keberadaan Tembok Besar Cina dan beberapa situs UNESCO lainnya memang merupakan bekal bagi Tiongkok untuk melakukan *soft power* melalui diplomasi publik. Akan tetapi media yang tepat untuk menggambarkannya tidak melalui diplomasi olahraga. Dengan kata lain, meskipun Tembok Besar Cina dan situs peninggalan lainnya merupakan modal bagi Tiongkok untuk melakukan *soft power*, hal tersebut menjadi tidak relevan dengan tulisan kali ini yang berfokus pada upaya peningkatannya melalui diplomasi olahraga.

Kelemahan kedua adalah kesulitan dalam mengukur peningkatan yang disebabkan oleh diplomasi olahraga. Salah satu ukuran terbaik dalam menunjukkan ukuran keberhasilan peningkatan *soft power* sebuah negara dalam kategori Pariwisata adalah peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi suatu negara atau obyek wisata tertentu. Meskipun Tembok Besar Cina dan beberapa situs UNESCO lainnya menjadi salah satu obyek yang digambarkan pada pembukaan Olimpiade 2008, akan menjadi sangat sulit untuk mengidentifikasi wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat wisata di Tiongkok dikarenakan

melihat pembukaan Olimpiade. Data dan literatur penunjang yang tersedia dapat menunjukkan jumlah wisatawan yang datang dari tahun ke tahun. Namun demikian, tidak terdapat data maupun literatur yang menunjukkan alasan yang membuat mereka tertarik untuk mengunjungi tempat wisata tersebut maupun darimana para wisatawan mendapatkan informasi mengenai tempat wisata tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada kategori Perdagangan. Meskipun terdapat peningkatan dalam hal Perdagangan antara Tiongkok dengan negara lainnya, menjadi sangat sulit untuk mengidentifikasi bahwa penyebab terjadinya perdagangan tersebut adalah karena dilakukannya diplomasi olahraga. Jika kita mau berfokus pada Perdagangan, salah satu cara yang mendekati akurasinya adalah peningkatan perdagangan atas komoditas olahraga dan data spesifik seperti ini sangat sulit didapatkan. Oleh karena itu, pada tulisan Kali ini hanya akan berfokus pada aspek Budaya, Citra, dan Diplomasi.

Budaya (*Culture*) merupakan salah satu kategori *soft power* yang didefinisikan oleh Grix et al (2019). Budaya juga merupakan salah satu arahan *soft power* yang dimiliki pemerintahan Tiongkok (Wuthnow, 2008). Tulisan Grix et al (2019) menyebutkan bahwa Olahraga itu sendiri merupakan salah satu bentuk *soft power* yang masuk ke dalam kategori Budaya.

Culture dalam konteks *soft power package* yang dinyatakan oleh Grix et al (2019) salah satunya termasuk budaya olahraga itu sendiri. Pada 13 Juli 2001, ketika Beijing berhasil memenangkan tender untuk menjadi tuan rumah Olimpiade, Tiongkok berjanji untuk mempromosikan dan mempopulerkan pengetahuan Olimpiade di antara 400 juta orang muda di Tiongkok. Kementerian Pendidikan Tiongkok merumuskan 'Program Pendidikan Olimpiade

Beijing 2008' untuk siswa sekolah dasar dan menengah. Targetnya adalah untuk mencapai 400 juta anak di lebih dari 400.000 sekolah di seluruh Cina. Target sebesar itu berarti juga bahwa sebagian besar populasi usia sekolah akan mendapatkan Pendidikan Olimpiade. Presiden IOC berkomentar bahwa ini akan menjadi 'warisan budaya penting dari Olimpiade 2008 dan terobosan bersejarah dalam penyebaran semangat Olimpiade.

Tiongkok juga menunjukkan kapasitas atlet-atlet yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan hasil pada Olimpiade 2008 yang menunjukkan bahwa pertama kalinya dalam sejarah, Tiongkok berada di puncak klasemen Olimpiade dengan perolehan 48 medali emas, 22 medali perak, dan 30 medali perunggu. Keberhasilan ini menunjang *soft power* yang dimiliki Tiongkok dalam hal budaya olahraga. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee (2010) yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan atas persepsi masyarakat internasional yang menganggap positif Tiongkok dalam hal budaya olahraga, terutama dalam aspek menjadi yang terbaik serta determinasi untuk menang. Tiongkok juga dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pembinaan olahraga terbaik.

Tiongkok juga meningkatkan kapasitas *soft power* yang dimilikinya dalam aspek Citra (*Branding*). Tiongkok telah mewujudkan acara olahraga termegah dan paling modern yang pernah disaksikan oleh umat manusia pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok ingin meningkatkan kapasitas *soft power* yang dimilikinya, terutama dalam hal mewujudkan wajah Tiongkok yang maju dan modern. Fasilitas olahraga, kepedulian terhadap isu lingkungan jauh ke depan melewati masanya, serta pertunjukan pembukaan Olimpiade yang hebat, ditunjang dengan berbagai fasilitas transportasi dan kesehatan membuat Tiongkok tidak lagi dikenal sebagai negara yang tertutup

dan terisolir tapi menjelma menjadi kekuatan baru dunia yang modern dan siap berkontribusi untuk kemajuan dunia.

Dalam konteks Diplomasi, keberhasilannya dapat diukur dari bagaimana perubahan persepsi masyarakat internasional setelah adanya Olimpiade 2008. Butcher (2009) melakukan penelitian dengan sampel persepsi warga negara New Zealand terhadap Tiongkok pasca Olimpiade 2008. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan signifikan mengenai penerimaan warga negara New Zealand terhadap Tiongkok dan warga Asia Timur lainnya. Bodet dan Lacassagne (2012) melakukan penelitian serupa dengan menggunakan masyarakat Inggris sebagai sampelnya dan menunjukkan adanya peningkatan citra positif warga Inggris terhadap Tiongkok meskipun tidak setinggi yang diekspektasikan oleh peneliti.

Kobierecki (2017) menunjukkan melalui penelitiannya bahwa komitmen Tiongkok untuk menggunakan olahraga sebagai instrumen diplomasi membuatnya mengembangkan atlet dan kemajuan olahraga secara sistematis. Upaya ini menunjukkan hasil berupa berhasilnya Tiongkok merajai perebutan medali Olimpiade 2008. Keberhasilan para atlet ini menciptakan persepsi pada masyarakat internasional yang dijadikan sampel bahwa ternyata Tiongkok merupakan negara yang maju, terutama dalam hal mengembangkan olahraga.

Secara keseluruhan, referensi tersebut dapat dijadikan dasar penarikan kesimpulan bahwa Olimpiade 2008 telah membawa citra Tiongkok menjadi lebih positif dalam persepsi masyarakat internasional. Persepsi positif ini, sesuai dengan tulisan Nye merupakan bentuk peningkatan kapasitas *soft power*.

Selain itu, peningkatan kapasitas dalam aspek diplomasi dapat kita lihat pada hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat. Hubungan

Tiongkok dengan Amerika Serikat mengalami pasang surut, namun demikian, kompleksitas menajam seiring dengan perang sipil di Tiongkok dimana Amerika Serikat memilih untuk lebih mendukung Taiwan yang dianggap lebih demokratis. Hal ini dianggap oleh Tiongkok sebagai bentuk langsung rivalitas politik Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Amerika Serikat juga pihak yang paling keras menentang Tiongkok sebagai tuan rumah Olimpiade. Senator Amerika Serikat, Jesse Helms dan beberapa anggota senat lainnya mengajukan rancangan aturan untuk menentang Tiongkok sebagai tuan rumah Olimpiade 2008 (Embassy of the People's Republic of China in Malaysia, 2001). Selain itu, Obama dan McCain, yang pada saat itu adalah senator dan berkampanye menjadi Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa jika mereka adalah presiden saat itu, mereka tidak akan menghadiri upacara pembukaan olimpiade di Tiongkok (Walt dan Paris, 2008).

Berbanding terbalik dengan kritik keras dan apa yang telah disampaikan pada saat menjelang Olimpiade, Tiongkok justru menjadi salah satu negara paling awal yang didatangi oleh Obama. Obama juga menjadi pihak yang memperluas cakupan dialog rutin yang dilakukan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat selama ini yang bernama Dialog Ekonomi Amerika Serikat – Tiongkok menjadi Dialog Strategis dan Ekonomi Amerika Serikat – Tiongkok. Penambahan kata tersebut, semakin memperluas lingkup diskusi diantara keduanya. Hal ini juga menunjukkan betapa besarnya pengaruh Tiongkok, serta secara tidak langsung melegitimasi keberadaan Tiongkok yang setara dengan Amerika Serikat.

Selain itu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan terus meningkat. Amerika sebelumnya berpihak dengan Taiwan, termasuk soal penyediaan senjata. Akan tetapi, hal tersebut

berubah setelah adanya pertemuan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat yang menyatakan kembali untuk menghormati kebijakan Satu Tiongkok yang mana berimplikasi terhadap kedaulatan Taiwan.

Legitimasi atas peningkatan *soft power* Tiongkok juga ditunjukkan pada saat KTT Keamanan Nuklir di tahun 2010. Tiongkok merupakan salah satu negara yang memilih untuk mengutamakan diplomasi dibandingkan dengan sanksi berupa embargo ekonomi atas isu nuklir Iran. Pertemuan tersebut bahkan tidak berhasil untuk membuat konsensi mengenai embargo ekonomi yang akan dikenakan kepada Iran dikarenakan adanya tentangan dari Tiongkok dan Rusia. Meskipun pada akhirnya kedua negara tersebut menyetujui sanksi berupa embargo ekonomi yang dilakukan, hal ini diduga kuat karena adanya unsur ancaman ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Rusia dan Tiongkok (Fisher, 2010). Meskipun begitu, hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Tiongkok di level dunia.

Selama pemerintahan Obama, Amerika Serikat menandatangani lebih banyak perjanjian bilateral dengan Tiongkok daripada pemerintahan Amerika Serikat lainnya, khususnya yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim (Joanna I, 2023). Peningkatan perjanjian bilateral ini, dalam pandangan penulis, merupakan bukti meningkatnya kapasitas *soft power* yang dimiliki oleh Tiongkok. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Grix et al (2019) bahwa bentuk *soft power* dalam kerangka Diplomasi bisa berupa perjanjian baik bilateral maupun multilateral.

Melalui hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan dinamika politik bagi Tiongkok dalam peta kekuatan dunia. Olimpiade 2008 merupakan pesta dimana Tiongkok menunjukkan kapasitas dan

kapabilitasnya sebagai warga negara dunia. Tulisan ini mendukung penelitian sebelumnya dari Putra (2018) bahwa olahraga dapat digunakan sebagai instrumen diplomasi yang penting bagi negara. Sepanjang tulisan ini dapat kita simpulkan bahwa olahraga, dalam hal ini Olimpiade adalah alat untuk menunjukkan kapabilitas suatu negara, dan akhirnya mendorong diplomasi antar dua negara. Tulisan ini juga mendukung temuan Jeong (2020) bahwa dengan menyelenggarakan acara olahraga internasional akan meningkatkan interaksi antara Amerika Serikat dengan negara Asia Timur lainnya, yang dalam tulisan ini ditunjukkan oleh hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok maupun dengan Taiwan. Jika kita menggunakan kerangka Grix, et al (2019) pada tulisan kali ini, maka nampak pada Tabel 2:

PENUTUP

Melalui berbagai inisiatif diplomasi olahraga, Tiongkok berhasil meningkatkan kapasitas soft power yang dimilikinya dalam tiga aspek, Budaya, Citra, dan Diplomasi. Dalam segi

Dalam segi Diplomasi, serangkaian diplomasi yang akhirnya membuat Tiongkok menjadi tuan rumah Olimpiade menunjukkan kemampuan diplomasi Tiongkok yang baik. Selain itu, Tiongkok juga mulai mengaktifkan dirinya dalam serangkaian upaya diplomasi dalam isu yang lebih besar dalam skala yang lebih luas. Secara garis besar, dalam tulisan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam perspektif diplomasi olahraga, Tiongkok berhasil memanfaatkan Olimpiade untuk menjadikan negara lain mengakui kekuatannya.

Tulisan ini menambahkan literatur dalam topik mengenai bagaimana Tiongkok secara cermat merancang dan melaksanakan strategi diplomasi olahraga untuk memperkuat citra positifnya dan memperluas pengaruh melalui soft power. Temuan-temuan ini memiliki relevansi yang luas dalam memahami peran olahraga dalam hubungan internasional serta strategi negara dalam mencapai tujuan politik dan ekonomi melalui event global.

Ke depannya, jika dimungkinkan, akan sangat

Tabel 2: Peningkatan Kapasitas *Soft power* Tiongkok menurut Penulis

Kategori	Peningkatan <i>Soft power</i> yang Dirasakan Tiongkok
Budaya	Meningkatnya persepsi positif masyarakat internasional atas sistem dan budaya olahraga Tiongkok
Branding	Tiongkok tidak lagi dikenal sebagai negara yang terbelakang dan terisolir
Diplomasi	Amerika Serikat menyatakan kembali bahwa mereka menghormati sistem Satu Tiongkok yang mana berimplikasi terhadap kedaulatan Taiwan
	Meningkatnya perjanjian dengan Amerika Serikat, yang mana menyentuh jumlah perjanjian bilateral paling tinggi selama masa pemerintahan seorang presiden Amerika yang pernah ada.
	Kemampuan Tiongkok untuk mengulur persetujuan sanksi embargo ekonomi atas isu nuklir Iran pada KTT Keamanan Nuklir serta menyuarakan dan mendorong keinginannya untuk melakukan diplomasi daripada sanksi.

Budaya, Tiongkok berhasil memperkenalkan dirinya sebagai negara yang memiliki budaya olahraga yang baik dan determinasi yang besar untuk menang. Dalam segi Citra, Tiongkok berhasil menggambarkan dirinya sebagai negara yang progresif, terbuka, dan siap berkolaborasi dengan dunia internasional.

menarik untuk menggunakan data lapangan dan melihat bagaimana warga Tiongkok sendiri memandang Olimpiade yang berhasil mereka selenggarakan di tahun 2008. Hal ini karena perspektif yang digunakan selama ini adalah mengenai bagaimana negara lain memandang Tiongkok pasca Olimpiade. Bagaimana warga

Tiongkok sendiri memandang Olimpiade tersebut dapat menambah pemahaman baru mengenai penggunaan Olimpiade bagi kepentingan nasional.

Selain itu, perluasan kajian dengan melakukan perbandingan antara Olimpiade 2008 dengan 2020 juga bisa dipertimbangkan. Tiongkok dalam konteks Beijing kini menjadi salah satu kota yang unik karena salah satu dari sedikit yang berhasil menyelenggarakan 2 Olimpiade, yaitu musim panas dan musim dingin bersamaan. Menarik melihat apa yang ingin dicapai oleh Tiongkok dalam konteks penyelenggaraan Olimpiade musim dingin dan bagaimana hal tersebut berbeda dengan apa yang ingin dicapai Tiongkok dalam Olimpiade musim panas 2008.

Daftar Pustaka

- Allison, L. (2006). *The global politics of sport: The role of global institutions in sport*. Routledge.
- Beacom, A. (2012). *International Diplomacy and the Olympic Movement the new mediators*. Palgrave Macmillan.
- Bijian, Z. (2005). China's "Peaceful rise" to great-power status. *Foreign Affairs*, 84(5), 18. <https://doi.org/10.2307/20031702>
- Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmons, B. A. (2013). Power and International Relations. In *Handbook of International Relations* (p. 252). essay, SAGE.
- Grix, J., & Lee, D. (2013). soft power, sports mega-events and emerging states: The lure of the politics of attraction. *Global Society*, 27(4), 521–536. <https://doi.org/10.1080/13600826.2013.827632>
- Grix, J., Brannagan, P. M., & Lee, D. (2019). *Entering the Global Arena Emerging States, soft power strategies and sports mega-events*. Springer Singapore.
- Hunter, A. (2009). Soft power: China on the Global Stage. *The Chinese Journal of International Politics*, 2(3), 373–398. <https://www.jstor.org/stable/48615728>
- Jeong, J. (2020). *How Nations Use Sport Mega-Events to Leverage Soft Power: A New Rise in East Asia*. Lestari, I. G. A. I., Sushanti, S., & Parameswari, A. A. A. I. (n.d.). *Soft Power sebagai Instrumen Peningkatan Ekonomi Korea Selatan: Popularitas Bangtan Sonyeondan (BTS) Tahun 2018-2020*. Universitas Udayana.
- Luo, S., & Huang, F. (2013). China's Olympic dream and the legacies of the Beijing Olympics. *The International Journal of the History of Sport*, 30(4), 443–452. <https://doi.org/10.1080/09523367.2013.765722>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. Jossey-Bass.
- Mingjiang, L. (2008). China Debates Soft power. *The Chinese Journal of International Politics*, 2(2), 287–308. <https://www.jstor.org/stable/48615681>
- Murray, S., & Pigman, G. A. (2013). Mapping The Relationship between International Sport and Diplomacy. *Sport in Society*, 17(9), 1098–1118. <https://doi.org/10.1080/17430437.2013.856616>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 7th Edition*. Pearson.
- Nye, J. S. (2005). *soft power: The means to success in world politics*. United States by PublicAffairs.
- Paschke, A., & Baffes, J. (2021, December 9). *World Bank Open Data*. Data. Retrieved December 10, 2021, from <https://data.worldbank.org/>.
- Putra, O. L., Sushanti, S., & Dewi, P. R. K. (n.d.). *Kepentingan Pertahanan Korea Selatan Melalui Joint Team Korea Dalam Winter Olympic 2018*. Universitas Udayana
- Shambaugh, D. (2015). China's soft-Power Push: The Search for Respect. *Foreign Affairs*, 94(4), 99–107. <http://www.jstor.org/stable/24483821>
- Steans, J., Pettiford, L., Diez, T., & El-Anis, I. (2010). *An introduction to international relations theory: Perspectives and themes*. Pearson Education Limited.
- Waltz, K. N. (2010). *Theory of international politics*. Waveland Press.
- Weber, M., Henderson, A. M., & Parsons, T. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Oxford University Press.

